



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah
Telepon (0771) 4575000 Fax. (0771) 4575050
TANJUNGPINANG

LAPORAN KINERJA
PELAKSANAAN TUGAS/TANGGUNGJAWAB
TENAGA AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BULAN: JANUARI 2022

Oleh:

MUKHTI, M. HUM



**LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS/TANGGUNGJAWAB TENAGA AHLI
BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BULAN: JANUARI 2022**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah tanggal 31 Desember 2021, Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, selanjutnya Tenaga Ahli Gubernur diperlukan pada bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk mendukung percepatan dan optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta peningkatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melaksanakan Tugas tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, serta menerima rekomendasi dari Tenaga Ahli Gubernur Kepulauan Riau Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 668/KPTS-1.1/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun Kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- b. Memberikan masukan dan pendampingan terhadap perumusan kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
- c. Melakukan review kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
- d. Memberikan rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Riau

- e. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang keahliannya
- f. Melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selain lingkup urusan administrasi juga sebagai dukungan menerima masukan rekomendasi dari tenaga Ahli Gubernur Kepulauan Riau dalam upaya membantu perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah membantu Gubernur dalam pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, memberikan masukan terhadap pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, melaksanakan koordinasi dan penyusunan program kegiatan bersama Gubernur Kepulauan Riau, serta menindaklanjuti petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, memberikan masukan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, merekomendasikan pembinaan teknis, administrasi, sumberdaya di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau membantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai tenaga ahli dalam memberikan rumusan program kerja di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, memberikan rekomendasi dan mengkoordinasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau terkait pelaksanaan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan memberikan rekomendasi serta menelaah konsep dan merumuskan kebijakan serta masukan kepada Gubernur Kepulauan Riau terkait Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

II. RUMUSAN KEGIATAN

Mengacu pada pendahuluan di atas, selanjutnya kami merumuskan item-item kegiatan dimaksud yang meliputi:

- a. Menjadi narasumber atau pembicara dalam kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, swasta dan masyarakat dalam pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Merivieu konsep kebijakan bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama di Provinsi Kepulauan Riau;

- d. Membangun komunikasi dan koordinasi bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama di Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Melakukan tugas lainnya yang diberikan sesuai bidang keahliannya.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Adapun tugas pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang ditetapkan keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 668/KPTS-1.1/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada jadwal kegiatan Tenaga Ahli selama bulan Januari 2022.

Adapun item-item kegiatan tersebut kami rincikan dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:

KEGIATAN TENAGA AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU BULAN JANUARI 2022

NO	Hari / Tanggal	Kegiatan	Rekomendasi
1	Senin, 03 Januari 2022 12.30 s/d 14.30 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran Rapat terkait Rakor Kepegawaian di Lingkungan Pemprov Kepri.	Memberitahukan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian untuk memperhatikan dan masukan terkait Rapat Koordinasi Rakor Kepegawaian di Lingkungan Pemprov Kepri Kepri
2	Selasa 04 Januari 2022 10.00 s/d 12.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Pembahasan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Labuh Jangkar	Memberitahukan kepada Koordinator Bagian Pemerintahan untuk mempertegas dalam Rapat Pembahasan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Labuh Jangkar, selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Kepulauan Riau
3	Kamis 06 Januari 2022 09.00 s/d 12.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam rencana Penandatanganan	Memberitahukan kepada Kepala Kepala Biro dan Kabag Kerjasama untuk memasukkan konsep gagasan yang penting dan

		Kesepakatan Bersama.	tujuan dari Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Pemprov Jambi salah satunya bidang, Pertanian, Beras, Kebutuhan Pokok yang merupakan memperoleh nilai lebih untuk masyarakat Provinsi Kepri
4	Kamis 13 Januari 2022 09.00 s/d 12.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Pembahasan Penampatan Lokasi Pembangunan Gedung Baru LAM dan DEKRANASDA.	Memberitahukan kepada Kepala Bagian Kerjasama untuk memasukkan konsep gagasan dan tindak lanjut dari rencana Pembahasan Penampatan Lokasi Pembangunan Gedung Baru LAM dan DEKRANASDA. Khususnya agar lokasi tersebut tidak bermasalah dalam Tata Ruang wilayah dan tentunya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
5	Senin 17 Januari 2022 09.30 s/d 12.30 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Evaluasi Penyusunan LKPJ SEKDA TA.2021	Memberitahukan kepada Kepala Biro untuk mempertegas dalam membahas materi pelaporan Rapat Evaluasi Penyusunan LKPJ SEKDA TA.2021 selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Kepulauan Riau.
6	Selasa 18 Januari 2022 09.00 s/d 12.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rakor Penatausahaan Keuangan Daerah.	Memberitahukan kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan serta Kepegawaian untuk memperhatikan dan menindaklanjuti hasil Rakor Penatausahaan Keuangan Daerah diantaranya menata secara baik penggunaan dan

			pertanggungjawaban penggunaan anggaran agar semua capaian program kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
7	Rabu 19 Januari 2022 08.30 s/d 16.30 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Pelaksanaan dan tata cara E Purchasing, yang akan dilaksanakan oleh Biro Pemoeda Setda Kepri	Memberitahukan kepada Kepala Biro agar Pelaksanaan E-Purchasing dapat dilaksanakan oleh ASN yang memiliki SDM yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, selanjutnya agar dalam penggunaan aplikasi E-Purchasing tahapan demi tahapan persyaratan terkait belanja barang dan jasa dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan sehingga proses E-Purchasing berjalan baik.
8	Kamis 20 Januari 2022 13.00 s/d 15.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Kerja dan Pembekalan Wawasan Kebangsaan	Memberitahukan kepada Kepala Biro untuk melaksanakan hasil Rapat Kerja dan Pembekalan Wawasan Kebangsaan khususnya pada OPD internal secara khususnya.
9	Kamis 20 Januari 2022 19.30 s/d 22.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rakor Evaluasi APBD TA 2021 dan Pelaksanaan APBD TA 2022 .	Memberitahukan kepada Koordinator Pemerintahan terkait masukan hasil Rakor Evaluasi APBD TA 2021 dan Pelaksanaan APBD TA 2022. Dan selanjutnya menjadi point penting untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Gubernur Kepulauan Riau.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja pelaksanaan Tugas/tanggungjawab Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Januari ini disusun, atas ucapannya kami ucapkan terimakasih.

Tanjungpinang, Januari 2022

Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Mukhti, M. HUM



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah
Telepon (0771) 4575000 Fax. (0771) 4575050
TANJUNGPINANG

LAPORAN KINERJA
PELAKSANAAN TUGAS/TANGGUNGJAWAB
TENAGA AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BULAN: FEBRUARI 2022

Oleh:

MUKHTI, M. HUM



**LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS/TANGGUNGJAWAB TENAGA AHLI
BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BULAN: FEBRUARI 2022**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah tanggal 31 Desember 2021, Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, selanjutnya Tenaga Ahli Gubernur diperlukan pada bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk mendukung percepatan dan optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta peningkatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melaksanakan Tugas tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, serta menerima rekomendasi dari Tenaga Ahli Gubernur Kepulauan Riau Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 668/KPTS-1.1/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun Kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- b. Memberikan masukan dan pendampingan terhadap perumusan kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau,
- c. Melakukan review kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau,
- d. Memberikan rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Riau.

- e. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang keahliannya,
- f. Melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selain lingkup urusan administrasi juga sebagai dukungan menerima masukan rekomendasi dari tenaga Ahli Gubernur Kepulauan Riau dalam upaya membantu perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah membantu Gubernur dalam pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, memberikan masukan terhadap pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, melaksanakan koordinasi dan penyusunan program kegiatan bersama Gubernur Kepulauan Riau, serta menindaklanjuti petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, memberikan masukan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, merekomendasikan pembinaan teknis, administrasi, sumberdaya di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau membantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai tenaga ahli dalam memberikan rumusan program kerja di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, memberikan rekomendasi dan mengkoordinasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau terkait pelaksanaan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan memberikan rekomendasi serta menelaah konsep dan merumuskan kebijakan serta masukan kepada Gubernur Kepulauan Riau terkait Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

II. RUMUSAN KEGIATAN

Mengacu pada pendahuluan di atas, selanjutnya kami merumuskan item-item kegiatan dimaksud yang meliputi:

- a. Menjadi narasumber atau pembicara dalam kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, swasta dan masyarakat dalam pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Merivieu konsep kebijakan bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama di Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Membangun komunikasi dan koordinasi bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama di Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Melakukan tugas lainnya yang diberikan sesuai bidang keahliannya.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Adapun tugas pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang ditetapkan keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 668/KPTS-1.1/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada jadwal kegiatan Tenaga Ahli selama bulan Januari 2022. Adapun item-item kegiatan tersebut kami rincikan dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:

KEGIATAN TENAGA AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU BULAN FEBRUARI 2022

NO	Hari / Tanggal	Kegiatan	Rekomendasi
1	Rabu, 09 Februari 2022 08.00 s/d 12.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran Rapat terkait pembahasan mengenai Teknis Evaluasi Pelaksanaan Pembukaan Wisata Batam-Bintan dan Singapura.	Memberitahukan kepada Kepala Koordinator Bagian Otomoni Daerah untuk memperhatikan dan masukan terkait Evaluasi Pelaksanaan Pembukaan Wisata Batam-Bintan dan Singapura untuk Pemulihan Ekonomi Nasional serta menindaklanjuti Surat Edaran Satgas Covid-19 tentang Penerapan Protokol Kesehatan bagi pelaku perjalanan Keluar Negeri kepada Gubernur Kepulauan Riau
2	Kamis 10 Februari 2022 08.00 s/d 09.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Evaluasi Laporan SPM tahun 2020 dan Persiapan	Memberitahukan kepada Koordinator Bagian Pemerintahan untuk mempertegas dalam membahas materi pelaporan berdasarkan Permendagri 100

		Penyusunan Pelaporan SPM Tahun 2021.	Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Kepulauan Riau
3	Kamis 10 Februari 2022 10.00 s/d 12.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Pembahasan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama beberapa Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia.	Memberitahukan kepada Kepala Bagian Kerjasama untuk memasukkan konsep gagasan yang penting dan tujuan dari pelaksanaan rapat tersebut merupakan pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Selanjutnya bentuk kerjasama direncanakan bergerak pada bidang pendidikan, kesehatan, pangan, peternakan, pertanian dan lain lain nya sesuai dengan kebutuhan suatu daerah khususnya Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
4	Jumat 11 Februari 2022 10.00 s/d 11.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Pembahasan Finalisasi Nota Kesepakatan .	Memberitahukan kepada Kepala Bagian Kerjasama untuk memasukkan konsep gagasan dan tindaklanjut tindak lanjut dari rencana dari pelaksanaan Nota Kesepakatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Komisi Pengawas

			Persaingan Usaha (KPPU) Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya dapat disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk persiapan kelengkapan Draf Produk Hukumnya.
5	Senin 14 Februari 2022 09.00 s/d 12.45 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Evaluasi Laporan SPM tahun 2020 dan Persiapan Penyusunan Pelaporan SPM Tahun 2021 untuk SPM Kota Tanjungpinang.	Memberitahukan kepada Koordinator Bagian Pemerintahan untuk mempertegas dalam membahas materi pelaporan berdasarkan Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang akan disusun oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Kepulauan Riau.
6	Selasa 15 Februari 2022 08.00 s/d 12.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Koordinasi terkait Rencana Kerjasama Penyediaan Kebutuhan Pokok/beras untuk kalangan pekerja di Provinsi Kepulauan Riau.	Memberitahukan kepada Kepala Bagian Kerjasama untuk memasukkan konsep gagasan yang penting dalam proses tindaklanjut dari Rakor tersebut yaitu berorientasi kepada hubungan kerjasama dalam membuka peluang bagi daerah yang berpotensi dan peluang dalam bidang kebutuhan

			<p>pokok/beras khususnya daerah-daerah penghasil dalam olahan ketahanan pangan/beras bersama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.</p>
7	<p>Rabu 16 Februari 2022 13.30 s/d 15.30 Wib</p>	<p>Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam kunjungan Audiensi dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna terkait Evaluasi Pelaporan SPM dan LPPD Tahun 2020 dan Persiapan Penyusunan SPM dan LPPD Tahun 2021.</p>	<p>Memberitahukan kepada Koordinator Bagian Pemerintahan dan Koordinator Bagian Otonomi Daerah agar selain hasil audiensi tersebut juga didapatkan solusi yang tepat sertai berujung kepada output dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaporan SPM dan LPPD oleh Kabupaten Natuna untuk masa yang akan datang yang tentunya wajib berpedoman kepada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 khususnya terkait SPM dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 terkait dengan LPPD.</p>
8	<p>Rabu 16 Februari 2022 13.30 s/d 15.30 Wib</p>	<p>Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Evaluasi Laporan SPM</p>	<p>Memberitahukan kepada Koordinator Bagian Pemerintahan untuk mempertegas dalam membahas materi pelaporan</p>

		<p>tahun 2020 dan Persiapan Penyusunan Pelaporan SPM Tahun 2021 untuk SPM Kabupaten Lingga.</p>	<p>berdasarkan Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang akan disusun oleh Pemerintah Kabupaten Lingga.</p>
9	<p>Kamis 17 Februari 2022 10.00 s/d 14.00 Wib</p>	<p>Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Monitoring Pemeriksanaan Kinerja Kelurahan Di Kota Tanjungpinang Se-Provinsi Kepri Terkait Kinerja Pengentasan Kemiskinan Oleh BPK Perwakilan Kepulauan Riau.</p>	<p>Memberitahukan kepada Koordinator Pemerintahan terkait masukan hasil monitoring dilakukan di wilayah Kelurahan se Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dievaluasi dan dibina secara baik, dan adapun Kelurahan yang dievaluasi kinerjanya terkait bidang Pemgantasan Kemiskinan yang ada di masing – masing wilayah kerja kelurahan diantaranya : kelurahan Tanjungpinang Barat, Kelurahan Bukit Cermin, Kelurahan Senggarang, Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Batu Sembilan, Kelurahan Pinang Kencana, Kelurahan Air Raja, Kelurahan Tanjung Unggat dan Kelurahan Dompak.</p>
10	<p>Senin 21 Februari 2022 09.00 s/d 12.00 Wib</p>	<p>Merumuskan gagasan dan kebijakan</p>	<p>Memberitahukan kepada Koordinator Bidang Pemerintahan</p>

		<p>pemikiran rapat terkait lahan Rumah Sakit Daerah Provinsi yang ada di Tanjung Uban.</p>	<p>untuk dapat berkordinasi dengan OPD terkait guna menyelesaikan Permasalahan lahan Rumah Sakit Daerah Provinsi yang ada di Tanjung Uban segera mungkin agar tidak menimbulkan polemik baru.</p>
11	<p>Kamis 24 Februari 2022 08.30 s/d 14.00 Wib</p>	<p>Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Koordinasi Teknis Penyusunan LPPD Tahun 2021 Tahun Anggaran 2022.</p>	<p>Memberitahukan kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otda disampaikan bahwa LPPD Provinsi Kepri dan Kabupaten, Kota se Kepri bisa sangat optimis memperoleh data yang baik dan diketahui bahwa Pelaporan LPPD yang merupakan suatu kewajiban oleh Kepala Daerah dalam hal ini Pelaporan LPPD provinsi untuk Gubernur dan pelaporan LPPD Kabupaten/Kota oleh Bupati dan Walikota se Provinsi Kepri diharapkan memperoleh nilai yang sangat tinggi untuk hasil penyusunan LPPD Tahun 2021 Tahun Anggaran 2022.</p>

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja pelaksanaan Tugas/tanggungjawab Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Januari ini disusun, atas ucapannya kami ucapkan terimakasih.

Tanjungpinang, Februari 2022

Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Mukhti, M. HUM



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah
Telepon (0771) 4575000 Fax. (0771) 4575050

TANJUNGPINANG

LAPORAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS/TANGGUNGJAWAB

TENAGA AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BULAN: MARET 2022

Oleh:

MUKHTI, S.H.,M.H



**LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS/TANGGUNGJAWAB TENAGA AHLI
BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BULAN: MARET 2022**

V. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah tanggal 31 Desember 2021, Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, selanjutnya Tenaga Ahli Gubernur diperlukan pada bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk mendukung percepatan dan optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta peningkatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melaksanakan Tugas tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, serta menerima rekomendasi dari Tenaga Ahli Gubernur Kepulauan Riau Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 668/KPTS-1.1/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun Kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- b. Memberikan masukan dan pendampingan terhadap perumusan kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
- c. Melakukan review kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
- d. Memberikan rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Riau
- e. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang

keahliannya

- f. Melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selain lingkup urusan administrasi juga sebagai dukungan menerima masukan rekomendasi dari tenaga Ahli Gubernur Kepulauan Riau dalam upaya membantu perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah membantu Gubernur dalam pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, memberikan masukan terhadap pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, melaksanakan koordinasi dan penyusunan program kegiatan bersama Gubernur Kepulauan Riau, serta menindaklanjuti petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, memberikan masukan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, merekomendasikan pembinaan teknis, administrasi, sumberdaya di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau membantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai tenaga ahli dalam memberikan rumusan program kerja di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, memberikan rekomendasi dan mengkoordinasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau terkait pelaksanaan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan memberikan rekomendasi serta menelaah konsep dan merumuskan kebijakan serta masukan kepada Gubernur Kepulauan Riau terkait Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

VI. RUMUSAN KEGIATAN

Mengacu pada pendahuluan di atas, selanjutnya kami merumuskan item-item kegiatan dimaksud yang meliputi:

- a. Menjadi narasumber atau pembicara dalam kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, swasta dan masyarakat dalam pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Merivieu konsep kebijakan bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama di Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Membangun komunikasi dan koordinasi bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama di Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Melakukan tugas lainnya yang diberikan sesuai bidang keahliannya.

VII. PELAKSANAAN KEGIATAN

Adapun tugas pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang ditetapkan keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 668/KPTS-1.1/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada jadwal kegiatan Tenaga Ahli selama bulan Januari 2022. Adapun item-item kegiatan tersebut kami rincikan dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:

**KEGIATAN TENAGA AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU BULAN MARET 2022**

NO	Hari / Tanggal	Kegiatan	Rekomendasi
1	Senin, 07 Maret 2022 09.30 s/d 12.30 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran Rapat Road Map.	Memberitahukan kepada Kepala Koordinator Bagian Otomoni Daerah dan Pemerintahan untuk memperhatikan masukan terkait Rapat Penyusunan Road Map
2	Kamis 10 Maret 2022 08.30 s/d 12.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Asistensi KIPP.	Memberitahukan kepada Koordinator Bagian Pemerintahan untuk menindaklanjuti hasil Rapat Asistensi KIPP diantaranya bersifat terbuka untuk diikuti kompetensi dalam pelayanan publik kepada masyarakat.
3	Jumat 11 Maret 2022 08.30 s/d 11.30 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Pra Forum dan forum Perangkat Daerah.	Memberitahukan kepada Kepala Bagian Kerjasama untuk memasukkan konsep gagasan yang penting dan hasil Rapat Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Pra Forum dan forum Perangkat Daerah kepada Gubernur Kepri terkait tugas lingkup

			Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
4	Kamis 17 Maret 2022 09.00 s/d 10.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Webinar Sosialisai Jabfung	Memberitahukan kepada Kepala Biro untuk memasukkan konsep gagasan dan tindaklanjut dari Webinar Sosialisai Jabfung, selanjutnya dapat disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk persiapan kesesuaian jabatan fungsional dan structural agar tetap menunjang kinerja pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
5	Kamis 17 Maret 2022 10.00 s/d 13.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Rapat Forum Koordinasi.	Memberitahukan kepada Koordinator Bagian Pemerintahan untuk mempertegas dalam Rapat Forum Koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri terkait dengan kebijakan pemerintahan pusat dan daerah di wilayah kerja pemerintahan dan otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
6	Selasa 22 Maret 2022 10.00 s/d 12.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Pengamanan BMD Pemprov Kepri	Memberitahukan kepada Kepala Bagian Kerjasama untuk memasukkan konsep gagasan yang penting dalam proses tindaklanjut dari Pengamanan BMD Pemprov Kepri yaitu berorientasi kepada

			barang milik daerah yang dimiliki dan barang milik daerah yang diserahkan ke pengelola yang menjadi asset suatu pengelola dan kepuasan dari proses penggunaan dan perawatannya untuk digunakan dan diperuntukan oleh masyarakat khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.
7	Rabu 25 Maret 2022 14.00 s/d 17.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Forum Perangkat Daerah Prov Kepri.	Memberitahukan kepada Koordinator Bagian terkait hasil Forum Perangkat Daerah Prov Kepri tersebut dan memberikan masukan yaitu Berkaitan dengan kerjasama diantaranya dapat kiranya memberikan dukungan pada masing-masing perangkat daerah dalam menunjang kinerja Gubernur Kepulauan Riau dalam menjalankan visi dan misi gubernur yang berorientasi kepada pelayanan dan pembangunan masyarakat dan wilayah Provinsi Kepulauan Riau
8	Kamis 24 Maret 2022 09.30 s/d 12.30 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Sosialisasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.	Memberitahukan kepada Koordinator Bagian Pemerintahan untuk mempertegas dalam membahas materi Undang-undang Perpajakan sebagaimana yang tertuang dalam UU nomor 28 Tahun 2007

			tentang ketentuan dan tata cara perpajakan (KUP) yang berorientasi kepada kontribusi kepada negara dan daerah khususnya Kepri untuk mendukung pembiayaan pembangunan di provinsi Kepri.
9	Senin 28 Maret 2022 13.00 s/d 17.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam RAKERNAS Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan .	Memberitahukan kepada Kepala Biro terkait masukan hasil RAKERNAS Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan, diantaranya saling berkoordinasi bersama DKP dan Disrjen Kelautan dan Perikanan untuk tindak lanjut penegakan hokum di laut khususnya wilayah 12Mil dari garis pantai yang masuk pada wilayah perairan provinsi Kepri.
10	Selasa 29 Maret 2022 09.00 s/d 12.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran rapat terkait Paparan Strategis Keberhasilan PT.Migas	Memberitahukan kepada Koordinator Bidang Pemerintahan untuk dapat berkordinasi dengan OPD terkait Paparan Strategis Keberhasilan PT.Migas dan yang menjadi hak dan kewajiban kepedulian PT. Migas untuk masyarakat provinsi kepri terkait hasil dan rencana pembangunan Migas dan kepedulian kepada masyarakat kepri.

11	Rabu 30 Maret 2022 09.00 s/d 16.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Musrembang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.	Memberitahukan kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otda terkait hasil dan masukan dari Rapat Musrembang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, diantaranya prioritas kepada kegiatan dan perencanaan yang berdampak langsung kepada masyarakat dan mendukung program visi dan misi gubernur dan wakil gubernur kepulauan riau.
----	---	---	---

I. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja pelaksanaan Tugas/tanggungjawab Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Januari ini disusun, atas ucapannya kami ucapkan terimakasih.

Tanjungpinang, Maret 2022

Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Mukhti, M. HUM



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah
Telepon (0771) 4575000 Fax. (0771) 4575050
TANJUNGPINANG

LAPORAN KINERJA
PELAKSANAAN TUGAS/TANGGUNGJAWAB
TENAGA AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BULAN: APRIL 2022

Oleh:

MUKHTI, M. HUM



**LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS/TANGGUNGJAWAB TENAGA AHLI
BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BULAN: APRIL 2022**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah tanggal 31 Desember 2021, Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, selanjutnya Tenaga Ahli Gubernur diperlukan pada bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk mendukung percepatan dan optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta peningkatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melaksanakan Tugas tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, serta menerima rekomendasi dari Tenaga Ahli Gubernur Kepulauan Riau Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 668/KPTS-1.1/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun Kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- b. Memberikan masukan dan pendampingan terhadap perumusan kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
- c. Melakukan review kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
- d. Memberikan rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Riau

- e. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang keahliannya
- f. Melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selain lingkup urusan administrasi juga sebagai dukungan menerima masukan rekomendasi dari tenaga Ahli Gubernur Kepulauan Riau dalam upaya membantu perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah membantu Gubernur dalam pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, memberikan masukan terhadap pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, melaksanakan koordinasi dan penyusunan program kegiatan bersama Gubernur Kepulauan Riau, serta menindaklanjuti petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, memberikan masukan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, merekomendasikan pembinaan teknis, administrasi, sumberdaya di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau membantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai tenaga ahli dalam memberikan rumusan program kerja di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, memberikan rekomendasi dan mengkoordinasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau terkait pelaksanaan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan memberikan rekomendasi serta menelaah konsep dan merumuskan kebijakan serta masukan kepada Gubernur Kepulauan Riau terkait Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

II. RUMUSAN KEGIATAN

Mengacu pada pendahuluan di atas, selanjutnya kami merumuskan item-item kegiatan dimaksud yang meliputi:

- a. Menjadi narasumber atau pembicara dalam kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, swasta dan masyarakat dalam pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Merivieu konsep kebijakan bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama di Provinsi Kepulauan Riau;

- d. Membangun komunikasi dan koordinasi bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama di Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Melakukan tugas lainnya yang diberikan sesuai bidang keahliannya.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Adapun tugas pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang ditetapkan keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 668/KPTS-1.1/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada jadwal kegiatan Tenaga Ahli selama bulan Januari 2022. Adapun item-item kegiatan tersebut kami rincikan dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:

**KEGIATAN TENAGA AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU BULAN APRIL 2022**

NO	Hari / Tanggal	Kegiatan	Rekomendasi
1	Jumat, 01 April 2022 08.30 s/d 11.30 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran Rapat terkait Rakor FGD Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kepri.	Memberitahukan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian untuk memperhatikan dan masukan terkait Rapat terkait Rakor FGD di Lingkungan Pemprov Kepri Kepri, diantaranya Kegiatan tersebut diperlukan guna menindaklanjuti permasalahan terkait Pelayanan Kepemerintahan dan hasilnya akan disampaikan kepada Gubernur melalui Sekda
2	Jumat 01 April 2022 13.00 s/d 15.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Pembahasan Rencana Perjanjian Kerjasama dengan PT. Rempang	Memberitahukan kepada Koordinator Bagian Pemerintahan untuk mempertegas dalam Rapat Pembahasan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Rempang dan, selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur

			Kepulauan Riau
3	Senin 04 April 2022 08.30 s/d 12.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Tindaklanjut Pertemuan Gubernur dengan Walikota Tanjungpinang dan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang.	Memberitahukan kepada Kepala Kepala Biro dan Kabag Otonomi Daerah untuk dapat melaporkan secara tertulis dalam bentuk telaahan staf dan hasil Rapat Tindaklanjut Pertemuan Gubernur dengan Walikota Tanjungpinang dan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang dijadikan refensi untuk menimalisir akan kekawatran terjadinya diskomunikasi antar kedua lembaga di Pemerintah Kota Tanjungpinang tersebut.
4	Senin 04 April 2022 13.00 s/d 15.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam rencana Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Investor dari Dernmark.	Memberitahukan kepada Kepala Kepala Biro dan Kabag Kerjasama untuk memasukkan konsep gagasan yang penting dan tujuan dari Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Investor Dernmark terkait bidang Perdagangan dan ekonomi yang tentunya harus memiliki nilai lebih untuk masyarakat Provinsi Kepri dan pembangunan Kepulauan Riau
5	Selasa 5 April 2022 09.30 s/d 12.30 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Pemekaran Desa Di Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di DISDUKCAPIL	Memberitahukan kepada Kepala Biro untuk mempertegas dalam membahas materi Pemekaran Desa Di Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Kepulauan Riau.

		Provinsi Kepulauan Riau	
6	Rabu 06 April 2022 09.00 s/d 12.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Sosialisasi Aplikasi Pena Kertas Sebagai Pendataan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemprov Kepri.	Memberitahukan kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan serta Kepegawaian untuk memperhatikan dan menindaklanjuti hasil Rakor Sosialisasi Aplikasi Pena Kertas Sbg Pendataan Pegawai Non ASN di Lingkungan Pemprov Kepri Daerah diantaranya menata secara baik selanjutnya Potensi Pengembangan Karir ASN tentunya menjadai skala priorotas dalam menunjang Kinerja Pelayanan kepada Masyarakat dan hal ini akan disampaikan juga kepada Gubernur.
7	Jumat 08 April 2022 10.00 s/d 16.30 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Kerja Bersama Pansus LKPj Tahun 2021	Memberitahukan kepada Kepala Biro terkait hasil rapat LKPj Tahun 2021 dan hasil akhir dari pelaksanaan rapat pansus tersebut harus ditindaklanjuti dan tetap komitmen menjalin kerjasama yang baik dan menjaga hubungan baik antara pihak legislatif dan eksekutif.
8	Sabtu 09 April 2022 10.00 s/d 14.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam pendampingan bersama Gubernur terkait Lounching Pulau Penyengat sebagai Pulau Digital	Memberitahukan kepada Kepala Biro untuk melaksanakan sosialisasi kepada public terkait dengan adanya perkembangan Digitalisasi ekonomi masyarakat pasca ditetapkannya pulaun penyengat sebagai pulau

			digital yang diresmikan oleh Gubernur Kepulauan Riau.
9	Selasa 12 April 2022 13.00 s/d 15.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rencana Kerjasa Investasi PLTS .	Memberitahukan kepada Kabag Kerjasama terkait Rapat Kerjasama dan masukan terhadap Presentasi Investasi PLTS Dan selanjutnya menjadi point penting untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Gubernur Kepulauan Riau.
10	Kamis, 21 April 2022 09.00 s/d 12.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Fasilitasi Rancangan Perda Kab.Bintan ttg Hari Jadi Kab. Bintan	Memebrikan masukan kepada Kepala Biro Pemerintahan terkait rujukan dan history dari asal nama nama Bintan dan sejarah yang dapat dijadikan dasar dalam pembentukan Rancangan Perda Kab Bintan tentang Hari Jadi Kabupaten Bintan.
11	Jumat, 22 April 2022 13.00 s/d 15.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat Undangan Rakor Persiapan Penyelenggaraan Puncak Acara Hari Otda ke XXVI Tahun 2022	Memebrikan masukan kepada Kepala Biro Pemerintahan melalui Koordinatir Otonomi Daerah terkait Undangan Rakor Persiapan Penyelenggaraan Puncak Acara Hari Otda ke XXVI Tahun 2022, selanjutnya dapat disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau.
12	Senin, 25 April 2022 10.00 s/d 12.30 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Rapat DPRD terkait Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan	Memebrikan masukan kepada Kepala Biro Pemerintahan melalui Koordinatir Pemerintahan terkait Rapat DPRD terkait Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan, dimana sangat berpengaruh kepada APBD TA. 2022 dan Perubahan

			APBD Prov Kepri. Hal ini harus segera diambil langkah kongkret bersama TAPD dan disampaikan secara terperinci kepada Gubernur Kepulauan Riau
13	Senin, 25 April 2022 13.00 s/d 15.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran dalam Penyampaian Sosialisasi Aplikasi Satu Data	Memebrikan masukan kepada Kepala Biro Pemerintahan melalui Koordinatir Pemerintahan terkait Rapat Penyampaian Sosialisasi Aplikasi Satu Data, yang dijadikan data valid yang harus komitmen dalam updatenya dan validasi datanya, yang harus disampaikan untuk daerah melalui Gubernur Kepri.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja pelaksanaan Tugas/tanggungjawab Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada bulan April ini disusun, atas ucapannya kami ucapkan terimakasih.

Tanjungpinang, April 2022

Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Mukhti, M. HUM



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah
Telepon (0771) 4575000 Fax. (0771) 4575050
TANJUNGPINANG

LAPORAN KINERJA
PELAKSANAAN TUGAS/TANGGUNGJAWAB
TENAGA AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BULAN: MEI 2022

Oleh:

MUKHTI, M. HUM



**LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS/TANGGUNGJAWAB TENAGA AHLI
BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BULAN: MEI 2022**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah tanggal 31 Desember 2021, Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, selanjutnya Tenaga Ahli Gubernur diperlukan pada bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk mendukung percepatan dan optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta peningkatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melaksanakan Tugas tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, serta menerima rekomendasi dari Tenaga Ahli Gubernur Kepulauan Riau Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 668/KPTS-1.1/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun Kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- b. Memberikan masukan dan pendampingan terhadap perumusan kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
- c. Melakukan review kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
- d. Memberikan rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Riau

- e. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang keahliannya
- f. Melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selain lingkup urusan administrasi juga sebagai dukungan menerima masukan rekomendasi dari tenaga Ahli Gubernur Kepulauan Riau dalam upaya membantu perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah membantu Gubernur dalam pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, memberikan masukan terhadap pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, melaksanakan koordinasi dan penyusunan program kegiatan bersama Gubernur Kepulauan Riau, serta menindaklanjuti petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, memberikan masukan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, merekomendasikan pembinaan teknis, administrasi, sumberdaya di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau membantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai tenaga ahli dalam memberikan rumusan program kerja di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, memberikan rekomendasi dan mengkoordinasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau terkait pelaksanaan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan memberikan rekomendasi serta menelaah konsep dan merumuskan kebijakan serta masukan kepada Gubernur Kepulauan Riau terkait Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

II. RUMUSAN KEGIATAN

Mengacu pada pendahuluan di atas, selanjutnya kami merumuskan item-item kegiatan dimaksud yang meliputi:

- a. Menjadi narasumber atau pembicara dalam kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, swasta dan masyarakat dalam pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Merivieu konsep kebijakan bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama di Provinsi Kepulauan Riau;

- d. Membangun komunikasi dan koordinasi bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama di Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Melakukan tugas lainnya yang diberikan sesuai bidang keahliannya.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Adapun tugas pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang ditetapkan keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 668/KPTS-1.1/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada jadwal kegiatan Tenaga Ahli selama bulan Januari 2022.

Adapun item-item kegiatan tersebut kami rincikan dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:

**KEGIATAN TENAGA AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU BULAN MEI 2022**

NO	Hari / Tanggal	Kegiatan	Rekomendasi
1	Selasa, 10 Mei 2022 10.00 s/d 12.30 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran terkait Rapat Pembahasan rencana Kerjasama dan mempelajari Presentasi PT. Akuo Energi	Memberitahukan kepada Bagian Kerjasama untuk memperhatikan dan masukan terkait Rapat Pembahasan Pembahasan rencana Kerjasama dan mempelajari Presentasi PT. Akuo Energi, diantaranya Kegiatan tersebut diperlukan guna menindaklanjuti langkah-langkah persiapan terkait dampak dan nilai lebih dari hasil kerjasama tersebut jika nantinya diwujudkan dan hal ini wajib disampaikan hasilnya kepada kepada Bapak Gubernur.
2	Rabu, 11 Mei 2022 09.00 s/d 12.30 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran terkait Rapat Pembahasan Penataan Desa Terkait Pemekaran Desa di	Memberitahukan kepada Koordinator Pemerintahan dan Sub Koordinator untuk memperhatikan dan masukan terkait Rapat Pembahasan Penataan Desa Terkait

		Provinsi Kepulauan Riau.	Pemekaran Desa di Provinsi Kepulauan Riau.i, diantaranya Kegiatan tersebut diperlukan guna menindaklanjuti permasalahan terkait Pelayanan Kepemerintahan dan hasilnya akan disampaikan kepada Gubernur
3	Kamis 12 Mei 2022 09.00 s/d 12.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran terkait Rapat Pembahasan Rapat Persiapan Bahan Masukan Persidangan KE -16 SOSEK MALINDO	Memberitahukan kepada Kabag Kerjasama untuk memperhatikan dan masukan terkait Rapat Persiapan Bahan Masukan Persidangan KE -16 SOSEK MALINDO diantaranya Kegiatan tersebut diperlukan guna menindaklanjuti permasalahan terkait Pelayanan Kepemerintahan dan hasilnya akan disampaikan kepada Gubernur
4	Selasa 17 Mei 2022 09.30 s/d 12.30 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran terkait Rapat Percepatan Legalisasi Tanah Pesisir dan Pulau Kecil	Memberitahukan kepada Kabag Kerjasama untuk memperhatikan dan masukan terkait Rapat Percepatan Legalisasi Tanah Pesisir dan Pulau Kecil, dimana peran Provinsi Kepri sangat berbatasan langsung dengan negara dan wilayah perbatasan, salah satunya sarana dan prasarana dan akses kemudahan masyarakat dalam bermukim dan menjadi hak yang diberikan terkait kepemilikan ha katas tanah tersebut dan hal ini haus disampaikan kepada Bapak Gubernur

5	Rabu 18 Mei 2022 13.00 s/d 15.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran terkait Rapat Persiapan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional	Memberitahukan kepada Kepala Biro dan jajarannya untuk memperhatikan dan masukan terkait Persiapan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, yang harus di kompilasi tugas bersama antara Biro Adpin Setda Provinsi Kepri dan tindak lanjut kesiapan acara tersebut harus disampaikan kepada Gubernur.
6	Kamis 19 Mei 2022 13.00 s/d 15.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran terkait Rapat Pembentukan Dewan Pengurus Korpri	Memberitahukan kepada Kepala Kasubbag TU dan Kepegawaian terkait dengan Rapat Pembentukan Dewan Pengurus Korpri yang hasilnya disampaikan kepada Gubernur
7	Jumat 20 Mei 2022 14.00 s/d 17.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran terkait rapat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	Memberitahukan kepada Kepala Kasubbag TU dan Kepegawaian terkait dengan rapat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Kepri yang harus diselesaikan apabila adanya LHP dan TAPD Provinsi Kepri agar disamkan hasilnya kepada TIM dan Salinan wajib disampaikan kepada Gubernur dan Sekretari Daerah.
8	Senin 23 Mei 2022 14.00 s/d 17.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran terkait rapat Pembinaan Jabfung Analis Kebijakan	Memberitahukan kepada Kepala Kasubbag TU dan Kepegawaian terkait dengan rapat Pembinaan Jabfung Analis Kebijakan, dimana harus sesuai dengan kebijakan hukum yang ada yang mengatur, sehingga

			langkah selanjutnya Gubernur akan disampaikan terkait issue Jabatan Fungsional
9	Selasa 24 Mei 2022 07.30 s/d 16.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran terkait rapat Undangan Pembinaan Jabfung Analisis Kebijakan	Memberitahukan kepada Kepala Kasubbag TU dan Kepegawaian terkait dengan rapat Penyampaian Undangan Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan disampaikan kepada Gubernur dan Sekretari Daerah.
10	Rabu 25 Mei 2022 09.00 s/d 12.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran terkait rapat Kegiatan Penyelenggaraan Komunikasi Sosial	Memberitahukan kepada Kepala Kasubbag TU dan Kepegawaian terkait dengan rapat Kegiatan Penyelenggaraan Komunikasi Sosial, dimana sangat berhubungan dengan OPD terkait yang harus ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Gubernur.
11	Rabu 25 Mei 2022 09.00 s/d 12.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran terkait rapat Kegiatan Penyelenggaraan Komunikasi Sosial	Memberitahukan kepada Kepala Kasubbag TU dan Kepegawaian terkait dengan rapat Kegiatan Penyelenggaraan Komunikasi Sosial, dimana sangat berhubungan dengan OPD terkait yang harus ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Gubernur.
12	Rabu 25 Mei 2022 09.00 s/d 12.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran terkait rapat Kegiatan Penyelenggaraan Komunikasi Sosial	Memberitahukan kepada Kepala Kasubbag TU dan Kepegawaian terkait dengan rapat Kegiatan Penyelenggaraan Komunikasi Sosial, dimana sangat

			berhubungan dengan OPD terkait yang harus ditindaklanjuti dan disampaikan kepada Gubernur.
--	--	--	--

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja pelaksanaan Tugas/tanggungjawab Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Mei ini disusun, atas ucapannya kami ucapkan terimakasih.

Tanjungpinang, Mei 2022

Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan
Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Mukhti, M. HUM



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Pusat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah
Telepon (0771) 4575000 Fax. (0771) 4575050
TANJUNGPINANG

LAPORAN KINERJA
PELAKSANAAN TUGAS/TANGGUNGJAWAB
TENAGA AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BULAN: JUNI 2022

Oleh:

MUKHTI, M. HUM



**LAPORAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS/TANGGUNGJAWAB TENAGA AHLI
BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BULAN: JUNI 2022**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah tanggal 31 Desember 2021, Biro Pemerintahan dan otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kepegawaian Sekretariat Daerah, selanjutnya Tenaga Ahli Gubernur diperlukan pada bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah untuk mendukung percepatan dan optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta peningkatan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melaksanakan Tugas tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, serta menerima rekomendasi dari Tenaga Ahli Gubernur Kepulauan Riau Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 668/KPTS-1.1/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun Kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- b. Memberikan masukan dan pendampingan terhadap perumusan kebijakan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
- c. Melakukan review kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
- d. Memberikan rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah di Provinsi Kepulauan Riau

- e. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang keahliannya
- f. Melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selain lingkup urusan administrasi juga sebagai dukungan menerima masukan rekomendasi dari tenaga Ahli Gubernur Kepulauan Riau dalam upaya membantu perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah membantu Gubernur dalam pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, memberikan masukan terhadap pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, melaksanakan koordinasi dan penyusunan program kegiatan bersama Gubernur Kepulauan Riau, serta menindaklanjuti petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, memberikan masukan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, merekomendasikan pembinaan teknis, administrasi, sumberdaya di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Provinsi Kepulauan Riau membantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagai tenaga ahli dalam memberikan rumusan program kerja di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, memberikan rekomendasi dan mengkoordinasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau terkait pelaksanaan di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan memberikan rekomendasi serta menelaah konsep dan merumuskan kebijakan serta masukan kepada Gubernur Kepulauan Riau terkait Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

II. RUMUSAN KEGIATAN

Mengacu pada pendahuluan di atas, selanjutnya kami merumuskan item-item kegiatan dimaksud yang meliputi:

- a. Menjadi narasumber atau pembicara dalam kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Memberikan masukan dan arahan serta bimbingan dalam kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, swasta dan masyarakat dalam pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Merivieu konsep kebijakan bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama di Provinsi Kepulauan Riau;

- d. Membangun komunikasi dan koordinasi bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama di Provinsi Kepulauan Riau;
- e. Melakukan tugas lainnya yang diberikan sesuai bidang keahliannya.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

Adapun tugas pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang ditetapkan keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 668/KPTS-1.1/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 tentang tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada jadwal kegiatan Tenaga Ahli selama bulan Januari 2022. Adapun item-item kegiatan tersebut kami rincikan dalam bentuk tabulasi seperti di bawah ini:

KEGIATAN TENAGA AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU BULAN JUNI 2022

NO	Hari / Tanggal	Kegiatan	Rekomendasi
1	Senin, 06 Juni 2022 14.00 s/d 17.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran terkait Rapat Rapat Evaluasi Repormasi dan Birokrasi serta Pemetaan Jabatan di Lingkungan Pemprov Kepri	Memberitahukan kepada Bagian Kerjasama dan Kasubbag TU dan Kepegawaian untuk memperhatikan dan masukan terkait Rapat Evaluasi Repormasi dan Birokrasi serta Pemetaan Jabatan di Lingkungan Pemprov Kepri diantaranya Kegiatan tersebut diperlukan guna menindaklanjuti langkah-langkah persiapan terkait dampak dan nilai lebih dari hasil Pemetaan Jabatan tersebut dan hasilnya disampaikan hasilnya kepada Bapak Gubernur.

2	Selasa, 07 Juni 2022 09.00 s/d 11.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran rapat terkait dengan pengembangan layanan pemerintahan berbasis elektronik	Memberitahukan kepada Koordinator Otonomi Daerah untuk memperhatikan dan masukan terkait rapat terkait dengan pengembangan layanan pemerintahan berbasis elektronik diantaranya Kegiatan tersebut diperlukan guna menindaklanjuti terkait dengan pelaksanaan layanan model SPBE di Biro Pemerintahan dan Otda dan hasil tindak lanjut akan disampaikan kepada Bapak Gubernur.
3	Rabu, 08 Juni 2022 09.00 s/d 16.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran rapat terkait dengan Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah di lingkungan sekretariat daerah provinsi kepri	Memberitahukan kepada Bagian Kerjasama dan Kasubbag TU dan Kepegawaian untuk memperhatikan dan masukan terkait Rapat Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah di lingkungan sekretariat daerah provinsi kepri.
4	Rabu, 09 Juni 2022 09.00 s/d 13.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran rapat terkait Percepatan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dalam Rangka Pengadaan Lahan Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah Kabupaten Karimun provinsi kepri	Memberitahukan kepada Bagian Kerjasama untuk memperhatikan dan masukan terkait Rapat terkait Percepatan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dalam Rangka Pengadaan Lahan Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah Kabupaten Karimun provinsi kepri, dan akan disampaikan tindaklanjut kepada Gubernur Kepri

5	Rabu, 09 Juni 2022 09.00 s/d 13.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran rapat terkait Percepatan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dalam Rangka Pengadaan Lahan Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah Kabupaten Karimun provinsi kepri	Memberitahukan kepada Bagian Kerjasama untuk memperhatikan dan masukan terkait Rapat terkait Percepatan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dalam Rangka Pengadaan Lahan Pengembangan Bandara Raja Haji Abdullah Kabupaten Karimun provinsi kepri, dan akan disampaikan tindaklanjut kepada Gubernur Kepri
6	Senin, 13 Juni 2022 09.00 s/d 13.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran Pembahasan Kesepakatan Bersama Penyederhanaan Prosedur Penyaluran BBM Bersubsidi Untuk Nelayan khususnya untuk nelayan diwilayah Provinsi Kepulauan Riau	Memberitahukan kepada Bagian Kerjasama untuk memperhatikan dan masukan terkait Rapat Pembahasan Kesepakatan Bersama Penyederhanaan Prosedur Penyaluran BBM Bersubsidi Untuk Nelayan khususnya untuk nelayan diwilayahPerairan dan terpencil didaerah Provinsi Kepulauan Riau akan disampaikan tindaklanjut kepada Gubernur Kepri
7	Rabu, 15 Juni 2022 13.00 s/d 15.30 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran Pembahasan terkait rencana pembentukan Tim Investasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Memberitahukan kepada Sub Koordinator Bagian Otonomi Daerah untuk memperhatikan dan masukan terkait Rapat Pembahasan rencana pembentukan Tim Investasi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, iklim investasi di Provinsi Kepri sangat terbuka peluang besar sehingga dapat direkomendasikan adanya suatu TIM Investasi Daerah yang dapat dibentuk oleh Gubernur Kepri untuk berkerja

			secara baik untuk kemajuan investasi di daerah.
8	Kamis, 16 Juni 2022 09.00 s/d 15.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran Pembahasan terkait Rapat Inventarisasi Dan Analisis Kerja Sama Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran Pembahasan terkait Rapat Inventarisasi Dan Analisis Kerja Sama Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus merekomendasikan kepada Kepala Bagian Kerjasama untuk menindaklanjuti hasil inventarisasi dan analisis kerja dan dilaporkan secara cepat kepada Gubernur Kepri, dan sekaligus memberikan masukan sebagai tindak lanjut dari ke
9	Senin. 20 Juni 2022 09.00 s/d 15.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran Pembahasan terkait Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran Pembahasan terkait Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, dengan merekomendasikan kepada Gubernur bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah meletakkan provinsi yang berifat ganda, satu sisi provinsi ditempatkan sebagai daerah otonom yang berfungsi menjalankan kewenangan desentralisasi dan pada sisi lain merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang

			berfungsi menjalankan kewenangan dekonsentrasi.
10	Rabu, 22 Juni 2022 14.00 s/d 17.00 Wib	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran Pembahasan terkait Rapat Kerja Gubernur Kepulauan Riau bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum RI dan FKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Merumuskan gagasan dan kebijakan pemikiran Pembahasan terkait rekomendasikan kepada Gubernur dalam Rapat Kerja Gubernur Kepulauan Riau bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum RI dan FKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap langkah-langkah dan persiapan untuk menuju pemilu dan pemilihan kepala daerah secara serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang akan datang, serta langkah antisipasi yang siaga dilaksanakan dan persiapkan untuk minimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan pada pemilukada dan pemilu khususnya terkait dengan pengganggaran.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja pelaksanaan Tugas/tanggungjawab Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni ini disusun, atas ucapannya kami ucapkan terimakasih.

Tanjungpinang, Juni 2022

Tenaga Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Mukhti, M. HUM

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPALA BUKU PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DAERAH
Kepulauan Riau
Desa ZULHENDRI, M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/ d)
NIP. 19660611 198602 1 004

